

# **Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Komunikasi Dan Informatika Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis**

**Dede Hermawan**

## **ABSTRAK**

*Hal yang melatarbelakangi penelitian berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu: 1) Masih adanya tahapan proses sosialisasi kepada wajib retribusi sehingga membutuhkan waktu relatif lama dalam kalibrasi data. 2) Adanya proses wajib RPM (Retribusi Pengendalian Menara) untuk mengajukan surat permohonan keringanan kepada Pemkab Ciamis yang memerlukan waktu lama.*

*Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal. 2. Hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi terdiri dari : Kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan kalibrasi data dengan memakan waktu yang lama sehingga pembayaran retribusi sedikit terhambat. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi. 3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sebagai berikut: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diupayakan melalui proses kalibrasi data yang dipercepat dengan sistem yang lebih canggih. Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemungutan. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.*

**Kata kunci : Retribusi, Pengendalian**

### **A. PENDAHULUAN**

Bidang Kominfo Dishubkominfo Ciamis merupakan bidang yang menangani pengendalian menara telekomunikasi. Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi besar di Kabupaten Ciamis adalah Retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dishubkominfo bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat membantu pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dishubkominfo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat membantu pembangunan di Kabupaten Ciamis. Beberapa kendala dalam pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya tahapan proses sosialisasi kepada wajib retribusi sehingga membutuhkan waktu relatif dalam diantaranya :
  - a. Kalibrasi data. Banyaknya menara yang berpindah kepemilikan yang tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis
  - b. Sosialisasi Perda dan Perbub yang terkait Retribusi Pengendalian Menara dengan cara mengundang para provider menara telekomunikasi yang berada di Kabupaten Ciamis untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati yang terkait retribusi menara telekomunikasi. Serta melibatkan para tim pengawasan menara telekomunikasi yang didalamnya terdapat SKPD teknis yang masuk dalam tim pengawasan.
  - c. Penyampaian SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) hasil sosialisasi dan kesepakatan dilaksanakan menjelang akhir tahun, memerlukan jarak waktu 1 bulan setengah. Sehingga wajib retribusi

terkendala pembayarannya meningkat retribusi belum teranggarkan menjelang tutup buku.

2. Adanya proses wajib RPM (Retribusi Pengendalian Menara) untuk mengajukan surat permohonan keringanan kepada Pemkab Ciamis yang memerlukan waktu lama, karena permohonan keringanan yang pertama tidak dikabulkan dan mereka kembali mengajukan keringanan yang kedua. Mengingat pada saat itu sudah mendekati jatuh tempo waktu pembayaran retribusi maka Pemkab Ciamis kembali mengabulkan permohonan tersebut, akan tetapi proses pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya, karena perusahaan sudah tutup buku.

penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang dipungut oleh Dishubkominfo tahun 2014 dan 2015 tidak stabil. Pada tahun 2014 target penerimaan tercapai 77,06%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 35,18%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan menunjukkan belum terpenuhinya fungsi dari Bidang Kominfo dalam mengoptimalkan penerimaan Daerah dari Retribusi, salah satunya penerimaan dari retribusi menara telekomunikasi.

Munculnya masalah di atas diduga karena pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak optimal. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menetapkan judul, "Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Kominfo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis".

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penarikan retribusi

pengendalian menara telekomunikasi oleh bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

### **2. Fokus Kajian**

Variabel dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun sub variabelnya adalah indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses menurut Suharti (2009:12). Yang meliputi dimensi sebagai berikut :

1. Efisiensi pemungutan (waktu,biaya), dengan indikator :
  - a. Waktu pemungutan retribusi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. Pengeanaan biaya pemungutan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Prosedur pemungutan, dengan indikator :
  - a. Kemudahan tahapan pemungutan retribusi yang diberikan kepada masyarakat
  - b. Adanya alur persyaratan dan kesederhanaan alur pemungutan
3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan, dengan indikator :
  - a. Hubungan yang terjadi antara pimpinan dan pelaksana dalam menjalin kedekatan emosional dengan para pemiliki menara telekomunikasi
  - b. Kerjasama tim pelaksana pemungutan terjalin dengan baik
4. Responsivitas pegawai, dengan indikator :
  - a. Daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dalam pelaksanaan penarikan retribusi

- b. Keramahan dan kemampuan petugas dalam penarikan retribusi
- 5. Sarana dan prasarana, dengan indikator :
  - a. Kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses pemungutan retribusi
  - b. Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan
  - c. Penyediaan lahan bagi pembangunan menara telekomunikasi sehingga memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari hasil wawancara dengan informan. Para informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan juga jelas, sehingga informasi itu akan membentuk satuan data tentang penelitian ini.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 1 orang kepala, 2 orang bidang kominfo, dan 1 provider menara telekomunikasi.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan secara univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari daerah hasil observasi dan wawancara. Hakekatnya dalam penelitian kualitatif, mengolah data adalah memberi kategori, mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat perhatiannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikembangkan oleh Salim (2006:22-23), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

#### a. *Data reduction (Reduksi data)*

Data *Reduction* (Reduksi data) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### b. *Data display (penyajian data)*

Data display (penyajian data) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini dalam bentuk teks naratif.

#### c. *Conclulsion Drawing/verification*

*Conclulsion drawing/verification*, yaitu peneliti berusaha menarik kesimpulan dan

melakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

### C. LANDASAN TEORITIS

Soeparmoko (1997:94) mengatakan bahwa “Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Retribusi menara telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, maka penulis menggunakan Pendekatan proses (process approach). Dalam pendekatan proses, efektivitas dilihat dari efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan dengan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Menurut Suharti (2009:12) adapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses adalah :

1. Efisiensi pemungutan (waktu,biaya)
2. Prosedur pemungutan
3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan
4. Responsivitas pegawai
5. Sarana dan prasarana.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

#### a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam hal ini mengadakan wawancara secara langsung terhadap Kepala Dinas, bidang kominfo, dan provider menara telekomunikasi.

Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal seperti ketepatan waktu pemungutan retribusi serta penyederhanaan alur retribusi.

**b. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

Hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan retribusi menara. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya terdiri dari : Kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan kalibrasi data dengan memakan waktu yang lama sehingga pembayaran retribusi sedikit terhambat. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi. Hal ini mempengaruhi penerimaan dari retribusi itu sendiri. Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya petugas pemungut retribusi.

**c. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai berikut: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diupayakan melalui proses kalibrasi data yang dipercepat dengan sistem yang lebih canggih. Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemungutan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal. Menambah keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi agar menjadi optimal.

**2. Pembahasan**

**a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

**1. Efisiensi Pemungutan**

Efisiensi pemungutan yang terdiri dari waktu pemungutan retribusi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan pengenaan biaya pemungutan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya wajib pajak yang tidak dapat membayar retribusi pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan keterlambatan dalam pemerolehan SKRD dari pihak dinas terkait. Pengenaan biaya pemungutan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meskipun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa provider yang meminta keringan pembayaran diluar NJOP yang telah ditentukan.

**2. Prosedur Pemungutan**

Prosedur pemungutan yang terdiri dari kemudahan tahapan dan alur persyaratan pemungutan retribusi berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tahapan yang ada sudah sesuai menurut petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi, meskipun kerap kali mengalami hambatan dalam proses kalibrasi data yang cukup lama. Alur persyaratan dan kesederhanaan alur pemungutan dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari lamanya proses kalibrasi data sehingga menghambat dalam penyusunan SKRD, yang membuat wajib pajak terlambat dalam membayar retribusi.

### **3. Koordinasi antara Pimpinan dan Bawahan**

Koordinasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik meskipun memerlukan beberapa hal perbaikan dan peningkatan. Hal ini terlihat dari loyalitas pimpinan dengan petugas pelaksana yang terjalin dengan begitu dekat dan terlihat kedekatan emosional yang tinggi, namun kedekatan emosional dengan pemilik menara telekomunikasi seringkali kurang terjalin dengan baik.

### **4. Responsivitas pegawai**

Responsivitas pegawai yang terdiri dari daya tanggap dan keramahan petugas dalam pemungutan retribusi berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari adanya petugas yang tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan dari pemilik menara telekomunikasi. Keramahan dan kemampuan petugas dalam penarikan retribusi dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas untuk ramah tamah terhadap pemilik menara serta memberikan senyum dalam setiap pelayanan retribusi.

### **5. Sarana dan prasarana**

Menyangkut Kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses pemungutan retribusi. Hal ini mencakup keberadaan dan fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pengguna layanan. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas kendaraan roda empat yang memerlukan penambahan dan perbaikan, agar dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya petugas pelaksana pemungut sehingga fungsi dan keberadaan pelaksana dirasakan kurang maksimal. Penyediaan lahan bagi pembangunan menara telekomunikasi sehingga memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pihak dinas

menyediakan lahan layak dan nyaman untuk didirikan menara telekomunikasi, walaupun ada respon negatif dari masyarakat terkait kedekatan menara dengan pemukiman warga, selalu ada solusi agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.

### **b. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

Secara administrasi dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis masih terdapat kendala/hambatan yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi adanya hasil penerimaan pajak reklame.

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan retribusi menara. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya terdiri dari :

1. Kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan kalibrasi data dengan memakan waktu yang lama sehingga pembayaran retribusi sedikit terhambat.
2. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu.
3. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi. Hal ini mempengaruhi penerimaan dari retribusi itu sendiri.
4. Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya petugas pemungut retribusi.

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2002:43) yang mengemukakan bahwa:

Kemampuan pegawai perlu diadakan diklat-diklat yang berhubungan langsung dengan

keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, kemudian meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana seperti perlengkapan komputer serta peningkatan penyuluhan kepada wajib retribusi secara intensif. Selain itu diperlukan penciptaan suasana keterbukaan antara atasan dan bawahannya untuk mengutarakan dan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap mekanisme organisasi yang dijalankan serta pemberian motivasi kerja berupa penghargaan kepada pegawai harus lebih ditingkatkan.

Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terdiri dari kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi. Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya petugas pemungut retribusi.

### **c. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai berikut.

1. Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diupayakan melalui proses kalibrasi data yang dipercepat dengan sistem yang lebih canggih.
2. Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemunutan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama.

3. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu.
4. Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal.
5. Menambah keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi agar menjadi optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis sesuai dengan pendapat Suhardi (2009:129) bahwa:

Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintahan memerlukan sebuah upaya yang mampu meminimalisir hambatan yang terjadi sehingga tujuan organisasi tetap dapat tercapai guna meningkatkan potensi organisasi lebih baik lagi.

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi terdiri dari meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemunutan. Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal.

## **2. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai "Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis" maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang

Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal.

- b. Hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi terdiri dari : Kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan kalibrasi data dengan memakan waktu yang lama sehingga pembayaran retribusi sedikit terhambat. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi.
- c. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sebagai berikut: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diupayakan melalui proses kalibrasi data yang dipercepat dengan sistem yang lebih canggih. Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemungutan. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.

## 2. Saran

Setelah penulis mengamati dan mempelajari maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menghadapi hambatan-hambatan adalah agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai kewajiban membayar retribusi yang lebih jelas.
2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (tata administrasi) baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan tentang retribusi menara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Universitas Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen : Dasar pengertian, dan Masalah*, revisi cetak 7. Jakarta. Bumi Aksara
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Marsiamo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi Yogyakarta
- Nugroho. 2003. *Good govermance*. Bandung ; Mandar maju.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Bumi Aksara

## IDENTITAS PENULIS

**DEDE HERMAWAN**, lahir di Ciamis pada tanggal 25 Mei 1976. Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis. Penulis berdomisili di Lingkungan Lebak Gg. Gotong Royong No. 108 RT/RW 04/12 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.